



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 17539-17548

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Sistem Manajemen Mutu dalam Menjaga Kualitas Audit (Studi Kasus pada KAP XXX)

Ari Kusnul Rohmawati, Ridwan Zulpi Agha

Program Studi Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

ari.kusnul.rohmawati.ak22@mhsw.pnj.ac.id, ridwan.zulfiagha@akuntansi.pnj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu audit pada Kantor Akuntan Publik XXX berdasarkan Standar Manajemen Mutu 1 (SMM 1) dan Standar Audit (SA) 220 pada masa awal implementasi SMM 1, menganalisis perannya dalam menjaga kualitas audit, serta menyusun rekomendasi perbaikan terhadap aspek yang belum sesuai dengan ketentuan standar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian ini adalah sistem manajemen mutu Kantor Akuntan Publik XXX. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu audit pada KAP XXX secara umum telah sesuai dengan sebagian besar ketentuan SMM 1 dan SA 220. Elemen tata kelola dan kepemimpinan, etika yang relevan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, serta pelaksanaan perikatan telah diterapkan sesuai ketentuan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, yaitu pada elemen proses penilaian risiko, sumber daya, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan remediasi. Selain itu, sistem manajemen mutu audit berperan dalam menjaga kualitas audit melalui kepatuhan terhadap standar audit, kecukupan dan ketepatan bukti audit, serta efektivitas proses audit. Berdasarkan hasil tersebut, disusun rekomendasi berupa penyempurnaan kebijakan, dokumentasi, dan implementasi sistem manajemen mutu agar lebih selaras dengan pendekatan berbasis risiko dalam SMM 1.

Kata Kunci: Sistem Manajemen Mutu 1 (SMM 1); SA 220; Kualitas Audit

1. Latar Belakang

1. Kualitas audit merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Dalam praktiknya, pelaksanaan audit melibatkan berbagai prosedur yang harus dilaksanakan sesuai standar profesi serta didukung oleh bukti audit yang cukup dan tepat agar auditor dapat memberikan opini secara andal. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu memiliki sistem yang mampu memastikan setiap perikatan audit dilaksanakan secara konsisten sesuai standar yang berlaku.[1]

2. Pada KAP XXX, salah satu dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan audit adalah pergantian tim auditor di tengah berlangsungnya suatu perikatan. Kondisi tersebut mengharuskan auditor pengganti untuk memahami kembali karakteristik bisnis klien, risiko audit, serta pekerjaan yang telah dilakukan oleh tim sebelumnya. Proses adaptasi yang tidak berjalan secara optimal berpotensi memengaruhi ketepatan pelaksanaan prosedur audit, kecukupan bukti audit, serta efektivitas penyelesaian perikatan [2]. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen mutu yang mampu memastikan mutu pelaksanaan audit tetap terjaga meskipun terdapat perubahan kondisi selama proses perikatan [2].

2. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Institut Akuntan Publik Indonesia mengadopsi Standar Manajemen Mutu 1 (SMM 1) sebagai pengganti Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 yang mulai berlaku efektif pada 31 Desember 2025. Berbeda dengan SPM 1 yang lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, SMM 1 menerapkan pendekatan berbasis risiko sehingga Kantor Akuntan Publik dituntut untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko mutu secara proaktif melalui perancangan, penerapan, dan pengoperasian sistem manajemen mutu yang efektif. Pada tingkat perikatan, implementasi SMM 1 juga didukung oleh Standar Audit (SA) 220 yang mengatur tanggung jawab rekan perikatan dan tim audit dalam mengelola serta mencapai mutu audit [3]

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pengendalian maupun manajemen mutu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas audit. Hasri et al. [4] merancang sistem manajemen mutu yang selaras dengan SMM 1 untuk meningkatkan tata kelola, kompetensi, dan pemantauan mutu audit. Sementara itu, Rahmawati dan Hastuti[5], Rahmawati dan Khabibah[6], serta Christyan [7] mengkaji implementasi Sistem Pengendalian Mutu (SPM) pada Kantor Akuntan Publik dan menemukan bahwa meskipun sebagian besar unsur pengendalian mutu telah diterapkan, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan. Selain itu, Suherman dan Aryati [8] serta Adha et al.[9] menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu dan standar audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM), perancangan sistem manajemen mutu, atau pengujian pengaruh sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit. Penelitian yang menganalisis kesesuaian implementasi awal Standar Manajemen Mutu 1 (SMM 1) setelah diberlakukan secara efektif, dengan mengacu pada ketentuan SMM 1 dan Standar Audit (SA) 220 serta mengkaji perannya dalam menjaga kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penerapan SMM 1 dan SA 220 pada KAP XXX, mengidentifikasi perannya dalam menjaga kualitas audit, serta menyusun rekomendasi perbaikan terhadap aspek yang belum sesuai dengan ketentuan standar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu 1 (SMM 1) dan Standar Audit (SA) 220 pada Kantor Akuntan Publik XXX, menganalisis perannya dalam menjaga kualitas audit, serta menyusun rekomendasi perbaikan terhadap aspek-aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan standar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu 1 (SMM 1) dan Standar Audit (SA) 220 pada Kantor Akuntan Publik (KAP) XXX serta perannya dalam menjaga kualitas audit. Objek penelitian meliputi kebijakan, prosedur, dan praktik sistem manajemen mutu yang diterapkan dalam pelaksanaan perikatan audit atas laporan keuangan. Fokus penelitian diarahkan pada delapan elemen SMM 1 dan penerapan SA 220 yang dianalisis berdasarkan kepatuhan terhadap standar audit, kecukupan dan ketepatan bukti audit, serta efektivitas proses audit.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi partisipatif terhadap 12 informan yang terdiri atas 1 Partner, 2 Manajer, 1 Assistant Manager, 3 Senior Auditor, dan 5 Junior Auditor yang terlibat dalam pelaksanaan audit di KAP XXX. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang meliputi pedoman Sistem Manajemen Mutu, kertas kerja pemeriksaan (KKP), serta standar profesi yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai dasar analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan implementasi sistem manajemen mutu audit. Observasi partisipatif dilakukan selama proses audit untuk mengamati penerapan sistem manajemen mutu dalam praktik. Selanjutnya, telaah dokumentasi dilakukan terhadap pedoman mutu, kertas kerja pemeriksaan, serta dokumen pendukung lainnya untuk memvalidasi hasil wawancara dan observasi melalui triangulasi sumber.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan praktik penerapan sistem manajemen mutu pada KAP XXX terhadap ketentuan SMM 1 dan SA 220. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menilai kesesuaian implementasi, mengidentifikasi perannya dalam menjaga kualitas audit, serta menyusun rekomendasi perbaikan terhadap aspek yang belum sesuai dengan ketentuan standar.

3. Hasil dan Diskusi

Pembahasan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tiga pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, pembahasan dibagi ke dalam tiga subbab, yaitu: (1) analisis kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu 1 (SMM 1) dan Standar Audit (SA) 220 pada KAP XXX, (2) analisis peran sistem manajemen mutu dalam menjaga kualitas audit yang ditinjau dari kepatuhan terhadap standar audit, kecukupan dan ketepatan bukti audit,

serta efektivitas proses audit, dan (3) upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian penerapan SMM 1 dan SA 220.

a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu 1 dan Standar Audit 220 pada KAP XXX

Hasil analisis kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu audit pada KAP XXX disusun berdasarkan delapan elemen dalam Standar Manajemen Mutu 1 (SMM 1) sebagai kerangka utama analisis. Pemilihan elemen SMM 1 didasarkan pada cakupannya yang mengatur sistem manajemen mutu pada tingkat Kantor Akuntan Publik secara menyeluruh. Meskipun tabel hasil disusun berdasarkan elemen-elemen SMM 1, analisis pada setiap elemen juga mengacu pada ketentuan SA 220 yang relevan, mengingat kedua standar tersebut saling melengkapi dalam mengatur sistem manajemen mutu pada tingkat Kantor Akuntan Publik dan pelaksanaan perikatan audit. Berikut adalah tabel 1 hasil analisis SMM 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Sistem Manajemen Mutu 1

Elemen SMM 1	Hasil Penelitian	Status Kesesuaian
Tata Kelola dan Kepemimpinan	Seluruh tim auditor berkomitmen menjaga kualitas dan kejujuran hasil audit dengan cara menyelesaikan semua prosedur secara teliti, mengikuti arahan serta pengawasan ketat dari partner, dan tegas menolak segala bentuk tekanan atau intervensi dari pihak klien yang tidak sesuai dengan standar	Sesuai
Etika yang Relevan	Auditor memahami etika profesi berbekal latar belakang pendidikan, panduan resmi dari KAP, pengisian formulir independensi dan kerahasiaan, serta arahan langsung dari pimpinan melalui diskusi (sharing season).	Sesuai
Penerimaan dan Keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu	Untuk memenuhi standar mutu hubungan klien, KAP menerapkan prosedur penyaringan kapasitas internal dan penilaian integritas klien di awal penugasan menggunakan formulir resmi yang menelaah kemampuan internal KAP dan integritas klien serta surat kontrak kerja.	Sesuai
Pelaksanaan Perikatan	Partner dan manajer bertanggung jawab penuh memimpin audit melalui review rutin mingguan dan formulir formal, sementara tim lapangan aktif belajar mandiri, berdiskusi memecahkan masalah dokumen, hingga mengarsipkan seluruh data secara rapi di OneDrive.	Sesuai
Sumber Daya	Meskipun pengelolaan aset intelektual sudah berjalan dengan baik, KAP masih belum optimal dalam mengelola sumber daya manusia akibat tingginya turnover karyawan serta dukungan fasilitas teknologi yang belum sepenuhnya difasilitasi oleh kantor.	belum sepenuhnya sesuai
Informasi dan Komunikasi	Budaya komunikasi dua arah di KAP berjalan sangat responsif melalui pelaporan berjenjang atas temuan mencurigakan atau material dan fleksibilitas gaya instruksi senior, didukung dengan kewajiban penandatanganan NDA untuk menjaga kerahasiaan data klien di tengah proses transisi kebijakan mutu dari SPM 1 menuju SMM 1 yang sedang ditinjau oleh PPPK.	sudah sesuai dalam penerapannya namun belum secara tertulis dalam kebijakannya
Pemantauan dan Remediasi	Secara keseluruhan, fungsi pemantauan, objektivitas, dan pelaporan berkala di KAP XXX sudah berjalan dengan Sesuai, namun proses evaluasi temuan Belum Optimal karena belum mengadopsi kewajiban analisis akar masalah (root cause analysis) dan sistem remedi terstruktur yang diwajibkan oleh SMM 1.	belum sepenuhnya sesuai

Elemen SMM 1	Hasil Penelitian	Status Kesesuaian
Penilaian Risiko	Secara praktis KAP XXX telah memiliki kapasitas kritis dalam mendeteksi dan mengeskalasikan risiko fraud, namun sistem penilaian risiko KAP XXX secara keseluruhan belum sesuai karena dokumen pedoman formalnya masih berbasis standar lama (SPM 1) dan belum mengintegrasikan kerangka kerja berbasis risiko (risk-based approach) sesuai mandat SMM 1.	belum sesuai

Tata Kelola dan Kepemimpinan

Elemen tata kelola dan kepemimpinan pada KAP XXX telah diterapkan sesuai dengan ketentuan SMM 1 dan SA 220. Hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi menunjukkan bahwa partner berperan aktif dalam melakukan supervisi, reviu pekerjaan audit, serta memberikan arahan kepada tim selama pelaksanaan perikatan. Keterlibatan tersebut mencerminkan komitmen pimpinan terhadap budaya mutu sebagaimana dipersyaratkan dalam SMM 1. Pada tingkat perikatan, praktik tersebut juga sejalan dengan SA 220 yang menegaskan tanggung jawab rekan perikatan dalam mengelola dan mencapai mutu audit melalui kepemimpinan yang efektif dan pengawasan yang memadai.

Selain itu, budaya mutu di KAP XXX tercermin dari penegakan etika dan profesionalisme dalam pelaksanaan audit. Partner secara konsisten menolak permintaan klien yang bertentangan dengan standar audit dan mempertahankan opini yang didasarkan pada kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sikap tersebut menjadi teladan bagi auditor sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa kualitas audit merupakan tanggung jawab seluruh personel yang terlibat dalam perikatan. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola dan kepemimpinan di KAP XXX telah mendukung penerapan sistem manajemen mutu secara efektif serta sejalan dengan tujuan SMM 1 dalam membangun budaya mutu di lingkungan Kantor Akuntan Publik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif partner dalam melakukan supervisi, reviu, serta menjaga independensi telah mendukung terciptanya budaya mutu pada KAP XXX. Temuan tersebut sejalan dengan Hasri dan Wijayati [4] yang menekankan bahwa komitmen pimpinan (*tone at the top*) merupakan fondasi utama dalam efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu 1 pada Kantor Akuntan Publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung Rahmawati dan Khabibah [6] yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam implementasi sistem pengendalian mutu untuk menjaga kualitas audit.

Etika yang Relevan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen etika yang relevan pada KAP XXX telah diterapkan sesuai dengan ketentuan SMM 1 dan SA 220. Meskipun KAP XXX belum menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai etika dan independensi, kantor telah menyediakan pedoman tertulis sebagai acuan bagi auditor dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, partner berperan aktif dalam menanamkan pemahaman etika melalui pengarahan, berbagi pengalaman, serta memberikan contoh perilaku profesional selama pelaksanaan audit. Praktik tersebut sejalan dengan ketentuan SA 220 yang menegaskan tanggung jawab rekan perikatan dalam memastikan tim audit memahami dan mematuhi ketentuan etika serta independensi selama perikatan berlangsung.

Kepatuhan terhadap etika profesi juga didukung oleh mekanisme dokumentasi melalui pengisian formulir pernyataan independensi dan kepatuhan etika oleh seluruh personel yang terlibat dalam perikatan. Formulir tersebut selanjutnya ditelaah dan disetujui oleh partner sebagai bagian dari pengendalian mutu. Temuan ini menunjukkan bahwa KAP XXX tidak hanya menerapkan etika profesi secara konseptual, tetapi juga mendokumentasikan kepatuhan tersebut sebagai bagian dari sistem manajemen mutu. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahmawati dan Hastuti [5] yang menyatakan bahwa internalisasi nilai independensi, integritas, dan kerahasiaan menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik.

Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien serta perikatan tertentu pada KAP XXX telah diterapkan sesuai dengan ketentuan SMM 1 dan SA 220. Sebelum menerima suatu perikatan, KAP XXX melakukan evaluasi terhadap kompetensi dan kapasitas sumber daya, integritas klien, serta kecukupan waktu pelaksanaan audit melalui prosedur dan formulir pengendalian mutu yang telah terdokumentasi. Proses tersebut memastikan bahwa keputusan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial, tetapi juga risiko yang dapat memengaruhi kualitas audit.

Selain itu, penilaian integritas klien didukung oleh penggunaan dokumen pengendalian mutu, surat perikatan, serta mekanisme evaluasi risiko selama pelaksanaan audit. KAP XXX juga memiliki prosedur pengunduran diri dari perikatan apabila ditemukan kondisi yang dapat mengganggu independensi atau integritas profesi. Pada tingkat perikatan, praktik tersebut sejalan dengan SA 220 yang mengharuskan rekan perikatan mempertimbangkan informasi mengenai integritas klien dan mengambil tindakan yang tepat apabila terdapat kondisi yang dapat memengaruhi keberlangsungan perikatan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien di KAP XXX telah mendukung pengelolaan risiko serta menjaga kualitas audit secara berkelanjutan [10].

Pelaksanaan Perikatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen pelaksanaan perikatan pada KAP XXX secara umum telah diterapkan sesuai dengan ketentuan SMM 1 dan SA 220. Tim perikatan telah memahami tanggung jawabnya dalam pelaksanaan audit, sementara partner dan manajer terlibat aktif dalam memberikan arahan, supervisi, serta review atas pekerjaan audit. Keterlibatan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan audit, khususnya dalam mendukung auditor yang masih berada pada tahap pengembangan kompetensi. Selain itu, KAP XXX telah memiliki prosedur konsultasi, penyelesaian perbedaan pendapat, serta dokumentasi perikatan yang terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung penerapan pertimbangan profesional, skeptisisme profesional, dan pengendalian mutu selama proses audit berlangsung.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengarahan teknis pada awal penugasan masih perlu ditingkatkan agar auditor, khususnya auditor junior, memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik klien dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Di samping itu, tingginya beban kerja pada tingkat asisten manajer menyebabkan komunikasi teknis belum berlangsung secara optimal. Namun, kondisi tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelaksanaan audit karena didukung oleh supervisi berjenjang, budaya konsultasi yang terbuka, serta sistem dokumentasi audit yang tertata dengan baik melalui pemanfaatan media penyimpanan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perikatan di KAP XXX telah memenuhi sebagian besar ketentuan SMM 1 dan SA 220, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas proses audit.[3]

Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen sumber daya pada KAP XXX telah diterapkan dengan tingkat kesesuaian yang cukup baik terhadap ketentuan SMM 1 dan SA 220. Dari aspek sumber daya manusia, KAP XXX telah menerapkan proses rekrutmen dan promosi yang didukung oleh seleksi kompetensi, orientasi, evaluasi kinerja, serta penandatanganan pakta independensi sebagai dasar pembentukan personel yang kompeten. Praktik tersebut sejalan dengan penelitian Judijanto et al. [11] yang menyatakan bahwa kompetensi auditor merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selain itu, KAP XXX juga menyediakan sumber daya intelektual berupa pedoman audit, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta akses terhadap informasi profesi melalui keanggotaan IAPI untuk mendukung pelaksanaan audit sesuai standar. Pada aspek teknologi, pemanfaatan sistem penyimpanan berbasis cloud melalui OneDrive turut mendukung koordinasi kerja tim dan pengelolaan dokumentasi audit secara lebih efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sinuraya dan Kurniawati [12] yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berbasis cloud dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit dan meningkatkan kualitas audit. Hasil menemukan bahwa pemanfaatan teknologi audit berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses audit dan kualitas audit yang dihasilkan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan. Program pelatihan internal yang terstruktur belum dilaksanakan secara optimal sehingga pengembangan kompetensi auditor

masih banyak bergantung pada seminar eksternal dan pembelajaran selama penugasan. Kondisi ini belum sepenuhnya sejalan dengan penelitian Slamet [13] yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan sarana penting dalam meningkatkan kompetensi auditor. Temuan tersebut juga didukung oleh Rasuli et al. [14] yang menjelaskan bahwa kompetensi auditor yang terus dikembangkan akan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas audit. Selain itu, sistem kompensasi dinilai belum mampu mempertahankan personel yang kompeten karena nilai insentif dan transparansi perhitungannya masih menjadi perhatian auditor, yang berdampak pada tingginya tingkat turnover. Dari sisi teknologi, belum tersedianya laptop dinas bagi seluruh auditor serta penggunaan email pribadi dalam korespondensi pekerjaan menunjukkan bahwa dukungan teknologi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung keamanan informasi dan efektivitas pelaksanaan audit. Temuan ini sejalan dengan prinsip dalam SMM 1 yang menekankan bahwa KAP perlu menyediakan sumber daya manusia, intelektual, dan teknologi yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan mutu. Secara keseluruhan, elemen sumber daya telah mendukung implementasi sistem manajemen mutu, namun masih memerlukan penguatan agar sepenuhnya selaras dengan pendekatan berbasis risiko dalam SMM 1. Hal tersebut juga sejalan dengan Basri et al. [15] yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi ISQM tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya, tetapi juga oleh pengembangan kompetensi personel, pemanfaatan teknologi, serta budaya mutu yang diterapkan secara berkelanjutan.

Informasi dan Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen informasi dan komunikasi pada KAP XXX telah diterapkan dengan tingkat kesesuaian yang cukup baik terhadap ketentuan SMM 1. Dari aspek sistem informasi, KAP XXX telah memanfaatkan teknologi penyimpanan berbasis cloud melalui OneDrive sebagai media pengelolaan dan penyimpanan dokumen audit secara terpusat. Seluruh dokumen yang diterima dari klien melalui berbagai media dikonsolidasikan ke dalam sistem tersebut sehingga informasi perikatan lebih terstruktur, mudah diakses, dan mendukung keamanan dokumentasi audit. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sinuraya dan Kurniawati [12] yang menunjukkan bahwa pemanfaatan cloud computing dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit melalui kemudahan akses informasi, pengelolaan data, dan penyimpanan dokumentasi secara lebih efisien. Pada aspek komunikasi internal, koordinasi antara partner, manajer, dan tim audit juga telah berjalan secara efektif melalui rapat, media komunikasi daring, serta pemantauan berkala terhadap perkembangan penugasan. Mekanisme komunikasi tersebut memungkinkan penyampaian informasi maupun penyelesaian permasalahan audit dilakukan secara cepat selama pelaksanaan perikatan [10].

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi terkait sistem manajemen mutu belum sepenuhnya berjalan optimal. Sebagian auditor, khususnya auditor junior, belum memperoleh sosialisasi yang memadai mengenai perubahan dari SPM 1 ke SMM 1 sehingga pemahaman terhadap kebijakan mutu terbaru masih terbatas. Selain itu, dokumen pedoman mutu yang digunakan di KAP XXX masih mengacu pada SPM 1 meskipun implementasi SMM 1 telah mulai dipersiapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi strategis dan pembaruan dokumentasi mutu masih perlu diperkuat agar seluruh personel memiliki pemahaman yang seragam terhadap sistem manajemen mutu yang berlaku.

Pemantauan dan Remediasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen pemantauan dan remediasi pada KAP XXX telah diterapkan sesuai dengan sebagian besar ketentuan SMM 1. KAP XXX telah menetapkan kebijakan pemantauan secara berkala melalui inspeksi terhadap efektivitas sistem manajemen mutu serta membentuk fungsi pengendalian mutu yang independen untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, KAP XXX juga memastikan bahwa personel yang melakukan pemantauan tidak terlibat dalam perikatan yang diperiksa sehingga objektivitas proses inspeksi tetap terjaga. Hasil pemantauan kemudian dikomunikasikan secara berjenjang kepada partner, rekan perikatan, dan manajer sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pelaksanaan audit berikutnya. Praktik tersebut telah sejalan dengan ketentuan SMM 1 [3] yang mengharuskan firma menetapkan aktivitas pemantauan secara berkelanjutan serta memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi dan objektivitas yang memadai. Ketentuan tersebut juga didukung oleh SA 220 (Revisi) [10] yang menekankan pentingnya pengawasan dan penelaahan terhadap pelaksanaan perikatan audit guna memastikan kualitas audit tetap terjaga.

Meskipun demikian, aspek remediasi masih memerlukan penyempurnaan agar sepenuhnya selaras dengan pendekatan berbasis risiko dalam SMM 1. Proses evaluasi yang dilakukan KAP XXX masih berfokus pada identifikasi dan penyampaian temuan, sedangkan investigasi terhadap akar penyebab (*root cause analysis*) atas kelemahan yang ditemukan belum diintegrasikan secara eksplisit dalam kebijakan maupun dokumentasi yang

digunakan. Akibatnya, tindakan perbaikan yang dilakukan belum sepenuhnya bersifat sistematis dan berorientasi pada pencegahan terulangnya permasalahan.

Penilaian Risiko

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan elemen penilaian risiko pada KAP XXX belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SMM 1. Berdasarkan telaah dokumen, pedoman internal KAP masih mengacu pada SPM 1 dan belum memuat kebijakan khusus mengenai proses penilaian risiko mutu yang berbasis risiko sebagaimana dipersyaratkan dalam SMM 1. Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sosialisasi perubahan dari SPM 1 ke SMM 1 belum dilakukan kepada tim pelaksana, sehingga pemahaman mengenai pendekatan penilaian risiko masih terbatas pada tingkat manajemen. Akibatnya, proses identifikasi dan penilaian risiko mutu belum dilaksanakan secara sistematis maupun terdokumentasi sebagai bagian dari sistem manajemen mutu.

Meskipun demikian, praktik audit di lapangan menunjukkan bahwa auditor telah menerapkan skeptisisme profesional dalam mengidentifikasi transaksi atau kondisi yang berisiko serta segera mendiskusikannya dengan manajer dan partner ketika ditemukan indikasi permasalahan. Namun, mekanisme tersebut masih bergantung pada pengalaman dan komunikasi antarpersonel, bukan pada prosedur penilaian risiko yang terdokumentasi. Selain itu, respons terhadap perubahan risiko klien masih berfokus pada aspek administratif, seperti penyesuaian surat perikatan, dan belum didukung oleh prosedur tertulis mengenai respons audit terhadap perubahan risiko maupun investigasi risiko mutu sebagaimana diatur dalam SMM 1. Oleh karena itu, KAP XXX perlu menyusun kebijakan penilaian risiko berbasis SMM 1 yang mencakup identifikasi, penilaian, respons, serta dokumentasi risiko mutu secara terstruktur agar proses pengendalian mutu dapat berjalan secara lebih proaktif dan konsisten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu pada KAP XXX berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap standar audit melalui penyediaan kebijakan, prosedur, dan pedoman audit yang mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta ketentuan profesi lainnya. Pedoman tersebut menjadi acuan auditor dalam melaksanakan setiap tahapan audit sehingga pelaksanaan perikatan tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, setiap perubahan standar disampaikan kepada personel agar pelaksanaan audit selalu mengikuti ketentuan terbaru.

Peran Sistem Manajemen Mutu dalam Menjaga Kualitas Audit

Bagian ini membahas peran sistem manajemen mutu dalam menjaga kualitas audit pada KAP XXX. Analisis dilakukan berdasarkan hasil telaah dokumen, wawancara, dan observasi dengan meninjau tiga indikator kualitas audit, yaitu kepatuhan terhadap standar audit, kecukupan dan ketepatan bukti audit, serta efektivitas proses audit.

Peran Sistem Manajemen Mutu terhadap Kepatuhan Standar Audit

Kepatuhan terhadap standar audit juga didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia melalui proses rekrutmen, orientasi, on the job training, serta pembagian tugas sesuai kompetensi auditor. Selama pelaksanaan audit, auditor memperoleh arahan, supervisi, dan review secara berjenjang dari senior auditor, manajer, hingga partner. Di samping itu, penerapan etika profesi dan independensi diperkuat melalui kebijakan formal, penandatanganan surat pernyataan independensi, serta pemantauan terhadap kepatuhan auditor selama perikatan berlangsung. Berbagai mekanisme tersebut memungkinkan setiap penyimpangan terhadap standar dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Melalui mekanisme pengendalian, supervisi, dan pemantauan tersebut, sistem manajemen mutu tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan audit dilaksanakan secara konsisten sesuai standar profesional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Adha et al. [9] yang menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu dan standar auditing berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selain itu, Suherman dan Aryati [8] menyatakan bahwa kelemahan dalam implementasi sistem pengendalian mutu dapat meningkatkan risiko terjadinya defisiensi audit. Dengan demikian, penerapan sistem manajemen mutu yang memadai berkontribusi dalam menjaga kepatuhan auditor terhadap standar profesional sekaligus mendukung terciptanya kualitas audit yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu pada KAP XXX berperan dalam meningkatkan efektivitas proses audit melalui pengaturan pelaksanaan perikatan yang terstruktur, mulai dari perencanaan penugasan, pembagian tugas berdasarkan kompetensi, supervisi dan review secara berjenjang, hingga penelaahan mutu sebelum laporan auditor diterbitkan. Mekanisme tersebut memungkinkan setiap tahapan audit berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar profesional.

Peran Terhadap Kecukupan dan Ketepatan Bukti Audit

Berdasarkan hasil telaah dokumen, wawancara, dan observasi, sistem manajemen mutu pada KAP XXX berperan dalam menjaga kecukupan dan ketepatan bukti audit melalui penguatan tanggung jawab rekan perikatan, pelaksanaan prosedur audit yang memadai, serta supervisi dan konsultasi selama proses audit. KAP menetapkan bahwa bukti audit yang diperoleh harus cukup, relevan, dan andal sebagai dasar penerbitan opini audit. Praktik tersebut sejalan dengan ketentuan SA 500 [16] yang mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar yang memadai dalam merumuskan opini audit. Selain itu, SA 220 (Revisi) [10] menegaskan bahwa rekan perikatan bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengawasi, dan menelaah pekerjaan tim audit guna memastikan bahwa bukti audit yang diperoleh telah memadai dan sesuai dengan standar profesional.

Proses pengumpulan bukti dilakukan melalui prosedur audit seperti vouching yang didukung dengan review berjenjang oleh manajer dan partner. Selain itu, auditor didorong untuk melakukan konsultasi apabila menghadapi permasalahan atau temuan yang kompleks sehingga kecukupan dan ketepatan bukti dapat dievaluasi sebelum laporan audit diterbitkan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu tidak hanya mengatur proses pengumpulan bukti, tetapi juga memastikan setiap bukti telah diverifikasi melalui pengawasan dan diskusi profesional. Praktik ini sejalan dengan IAASB [17] yang menjelaskan bahwa supervisi, konsultasi, dan review merupakan bagian penting dari implementasi ISQM 1 untuk memastikan kualitas pelaksanaan perikatan audit. Temuan tersebut juga didukung oleh Basri et al. [15] yang menyatakan bahwa efektivitas sistem manajemen mutu bergantung pada pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan komunikasi yang berkelanjutan selama proses audit.

Secara keseluruhan, sistem manajemen mutu di KAP XXX berperan dalam menjaga kualitas audit dengan memastikan bukti audit yang dikumpulkan memenuhi prinsip kecukupan dan ketepatan sebagaimana diatur dalam SA 500, sehingga opini auditor didasarkan pada bukti yang relevan, andal, dan memadai.

Peran Terhadap Efektivitas Proses Audit

Efektivitas proses audit pada KAP XXX didukung oleh pembentukan tim perikatan yang mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman auditor, disertai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan sejak awal penugasan. Selama pelaksanaan audit, proses supervisi dan *review* dilakukan secara berkala oleh senior auditor, manajer, dan partner untuk memantau perkembangan pekerjaan, mengevaluasi temuan, serta memberikan arahan apabila ditemukan kendala. Selain itu, manajer secara aktif melakukan *follow-up* terhadap progres pekerjaan dan berkoordinasi dengan klien untuk memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan sehingga potensi keterlambatan penyelesaian audit dapat diminimalkan. Praktik tersebut sejalan dengan ketentuan SA 220 (Revisi) [10] yang menegaskan bahwa rekan perikatan bertanggung jawab mengarahkan, mengawasi, dan menelaah pekerjaan tim audit agar pelaksanaan audit berjalan sesuai dengan standar profesional. Perencanaan penugasan sejak awal juga sesuai dengan SA 300 [18] yang menekankan bahwa perencanaan audit yang memadai merupakan dasar bagi pelaksanaan audit yang efektif dan efisien.

Sistem manajemen mutu juga mendukung efektivitas proses audit melalui mekanisme konsultasi dan penyelesaian perbedaan pendapat secara berjenjang. Setiap permasalahan yang muncul selama perikatan didiskusikan bersama manajer maupun partner hingga diperoleh solusi yang tepat sebelum proses audit dilanjutkan. Mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan SMM 1 yang mengharuskan firma menetapkan kebijakan konsultasi dan penyelesaian perbedaan pendapat untuk mendukung kualitas pelaksanaan perikatan. Selain itu, IAASB [17] dalam *First-Time Implementation Guide for ISQM 1* menjelaskan bahwa konsultasi yang efektif merupakan bagian penting dari sistem manajemen mutu karena membantu auditor memperoleh pertimbangan profesional yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Selain itu, efektivitas proses audit diperkuat melalui pelaksanaan *Engagement Quality Control Review* (EQCR) sebelum laporan auditor diterbitkan. Penelaahan ini memastikan bahwa seluruh prosedur audit telah dilaksanakan sesuai standar serta didukung oleh bukti audit yang memadai sebelum laporan diterbitkan. Praktik tersebut sejalan

dengan ketentuan SA 220 (Revisi) [10] yang menekankan pentingnya penelaahan terhadap pekerjaan audit sebagai bagian dari tanggung jawab rekan perikatan dalam menjaga kualitas audit. Selanjutnya, SA 230 [19] juga menegaskan bahwa dokumentasi audit yang memadai merupakan bagian penting dalam mendukung proses *review*, memudahkan evaluasi atas pekerjaan yang telah dilakukan, serta memberikan dasar yang memadai bagi simpulan auditor. Dengan demikian, sistem manajemen mutu pada KAP XXX tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit melalui pengaturan proses kerja yang sistematis, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa setiap tahapan audit dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan standar profesional..

Upaya Perbaikan atas Ketidaksesuaian Penerapan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen internal, wawancara, dan observasi, masih ditemukan beberapa aspek penerapan sistem manajemen mutu di KAP XXX yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SMM 1 dan SA 220. Ketidaksesuaian tersebut terutama disebabkan karena pedoman mutu yang digunakan masih mengacu pada SPM 1 sehingga beberapa persyaratan dalam SMM 1 belum terakomodasi secara formal. Temuan utama meliputi belum diterapkannya proses penilaian risiko mutu berbasis risk-based approach, mekanisme pemantauan dan remediasi yang belum menggunakan root cause analysis, serta beberapa aspek pengelolaan sumber daya, teknologi, dan informasi yang masih memerlukan penyempurnaan.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan KAP XXX adalah memperbarui pedoman sistem manajemen mutu agar selaras dengan ketentuan SMM 1, khususnya terkait proses penilaian risiko, dokumentasi respons terhadap risiko mutu, serta prosedur pemantauan dan remediasi yang lebih sistematis. Selain itu, peningkatan kompetensi personel melalui sosialisasi dan pelatihan mengenai SMM 1 perlu dilakukan agar seluruh auditor memiliki pemahaman yang sama terhadap pendekatan manajemen mutu berbasis risiko.

Dari aspek sumber daya, KAP XXX juga disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia melalui evaluasi sistem kompensasi dan transparansi pemberian insentif guna menekan tingkat turnover auditor. Di sisi teknologi, penyediaan akun email resmi dan peningkatan fasilitas pendukung audit akan memperkuat keamanan informasi serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan perikatan. Sementara itu, kebijakan mengenai informasi dan komunikasi perlu diperbarui agar mekanisme komunikasi internal maupun eksternal terdokumentasi secara formal sesuai dengan tujuan mutu dalam SMM 1.

Secara keseluruhan, rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu di KAP XXX dengan ketentuan SMM 1 dan SA 220. Implementasi perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan tidak hanya akan memperkuat sistem pengelolaan mutu audit, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas audit yang lebih andal dan konsisten sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Mutu 1 (SMM 1) dan Standar Audit (SA) 220 pada Kantor Akuntan Publik XXX secara umum telah sesuai dengan sebagian besar ketentuan standar yang berlaku. Kesesuaian tersebut terlihat pada penerapan elemen tata kelola dan kepemimpinan, etika yang relevan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, serta pelaksanaan perikatan. Namun, masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, khususnya pada proses penilaian risiko, pengelolaan sumber daya, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan remediasi agar implementasi sistem manajemen mutu lebih selaras dengan pendekatan berbasis risiko yang diatur dalam SMM 1. Penerapan sistem manajemen mutu audit juga berperan dalam menjaga kualitas audit melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar audit, kecukupan dan ketepatan bukti audit, serta efektivitas proses audit. Oleh karena itu, penyempurnaan kebijakan, dokumentasi, dan implementasi sistem manajemen mutu secara berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat efektivitas penerapan SMM 1 dan SA 220 serta meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi SMM 1 di Indonesia.

Referensi

- [1] S. M. Putti and C. Kuntadi, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit: pengalaman audit, skeptisisme profesional dan kepercayaan diri," *J. Manaj. Dan Akunt.*, vol. 1, no. 3, pp. 129–138, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.62017/wanargi>
- [2] D. Handayani, "PENGARUH AUDIT TENURE , ROTASI AUDIT , UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) , DAN

- UKURAN PERUSAHAAN KLIEN,” vol. 14, no. 1981, pp. 1–14, 2025.
- [3] Institut Akuntan Publik Indonesia, *Standar Manajemen Mutu 1*. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia, 2024.
- [4] N. C. Hasri, N. Wijayati, and U. Indonesia, “Quality Management System Design for KAP MNL Aligned with SMM 1 Requirements,” 2026, doi: 10.24843/EJA.2026.v36.i01.p01.
- [5] Rika Yulia Rahmawati and Theresia Dwi Hastuti, “Implementasi Sistem Pengendalian Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Abc Dengan Basis Value,” *J. Akun Nabelo J. Akunt. Netral, Akuntabel, Objekt.*, vol. 6, no. 1, pp. 968–984, 2025, doi: 10.11594/untad.jan.6.1.19608.
- [6] Alvina Hanifa Rahmawati and Nibras Anny Khabibah, “Analisis Penerapan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Purba Lauddin & Rekan Kantor Perwakilan Magelang),” vol. 6, no. 1, 2024.
- [7] A. G. Christyan, “PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN MUTU AUDIT DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK Studi pada Kantor Akuntan Publik TWIT.pdf,” 2021.
- [8] N. F. D. Suherman and T. Aryati, “Pengaruh Defisiensi Sistem Pengendalian Mutu (Spm) Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Defisiensi Audit,” *J. Ekon. Trisakti*, vol. 2, no. 2, pp. 357–368, 2022, doi: 10.25105/jet.v2i2.14180.
- [9] B. M. H. A. Adha, M. Suryo, and D. Maulana, “PENINGKATAN KUALITAS AUDIT : STANDAR AUDITING DAN SISTEM PENGENDALIAN MUTU,” vol. 9, no. 2, pp. 67–76, 2025.
- [10] Institut Akuntan Publik Indonesia, “STANDAR AUDIT 220,” 2025, *Institut Akuntan Publik Indonesia, Jakarta*.
- [11] L. Judijanto, “Pengaruh Independensi Auditor terhadap Opini Audit pada Perusahaan Terdaftar di BEI,” *J. Akunt. Dan Keuang. West Sci.*, vol. 4, no. 01, pp. 70–77, 2025, doi: 10.58812/jakws.v4i01.1941.
- [12] Michael Agintha Sinuraya and Sri Kurniawati, “Pengaruh Cloud Computing, Kompetensi Auditor, Pengalaman Kerja, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Daerah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat,” *Ikraith-Ekonomika*, vol. 9, no. 1, pp. 240–247, 2026, doi: 10.37817/ikraith-ekonomika.v9i1.5547.
- [13] B. Slamet, “Analisis Pengaruh Diklat Audit Investigatif Terhadap Peningkatan Kompetensi Auditor Pemerintah Pusat Dan Daerah Pada Pusdiklatwas Bpkp Ciawi- Bogor,” *JABI (Jurnal Akunt. Berkelanjutan Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 26–38, 2020, doi: 10.32493/jabi.v3i1.y2020.p26-38.
- [14] M. Rasuli, A. Zarefar, A. Zarefar, and R. Juhaira Johari, “Professional Scepticism, Independence, Information Technology, Auditor Competence, And Audit Quality,” *J. Reviu Akunt. dan Keuang.*, vol. 14, no. 1, pp. 243–257, 2024, doi: 10.22219/jrak.v14i1.29963.
- [15] H. Basri, T. Widyastuti, Harnovinsah, C. Kuntadi, and N. Ahmar, “Menakar efektivitas isqm: perspektif global tentang mutu audit dan tata kelola risiko,” vol. 06, pp. 151–164, 2025.
- [16] IAPI, *SA 500*. 2021.
- [17] IAASB, “FIRST-TIME IMPLEMENTATION GUIDE. International Standard on Quality Management 2, Engagement Quality Reviews,” no. June, p. 16, 2021, [Online]. Available: <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-1-first-time-implementation-guide-quality-management.pdf>
- [18] IAPI, “Standar Audit 300,” 2025.
- [19] IAPI, “Standar Audit 230,” 2025.